



INDEF

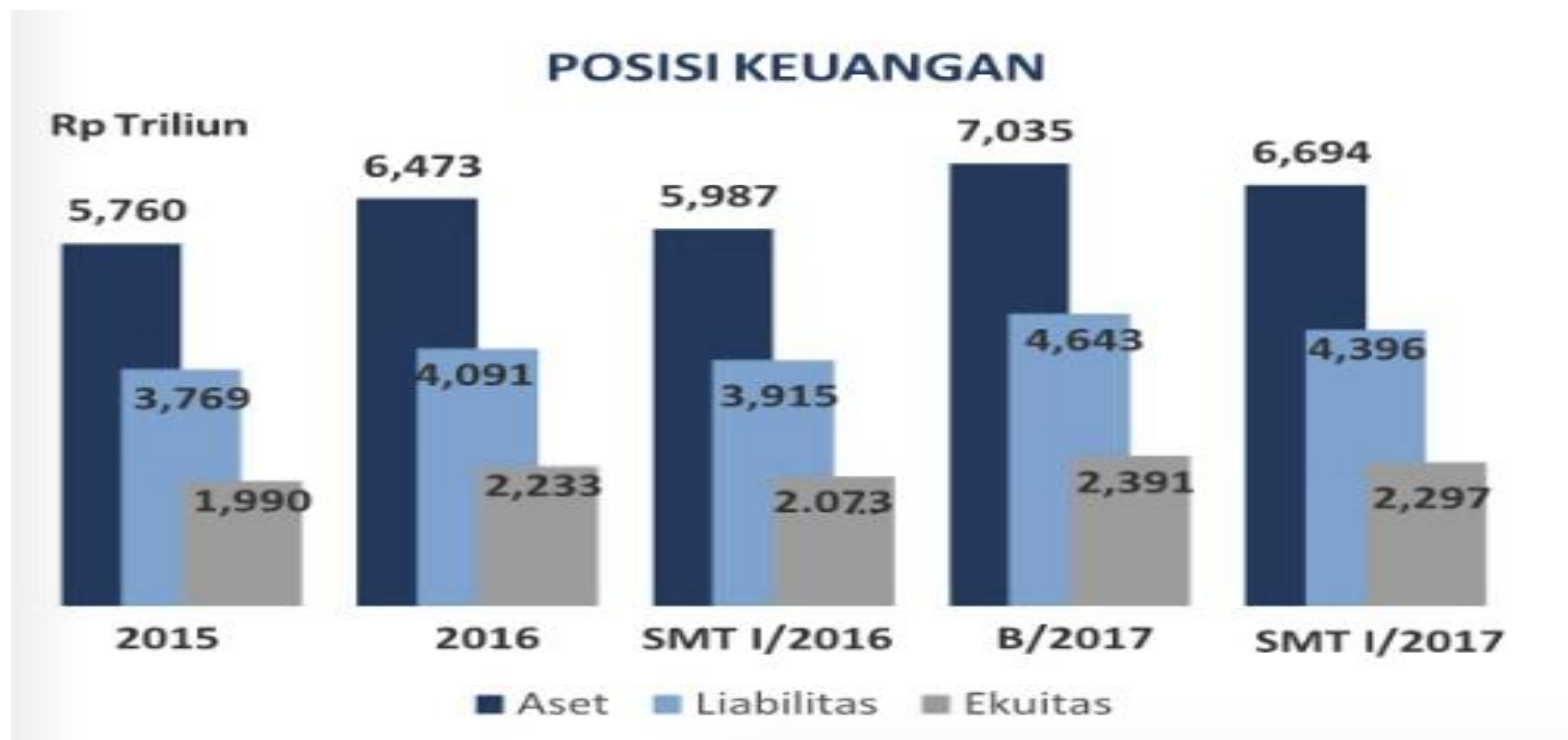


POLEMIK HOLDING BUMN

Bhima Yudhistira Adhinegara
081318168622

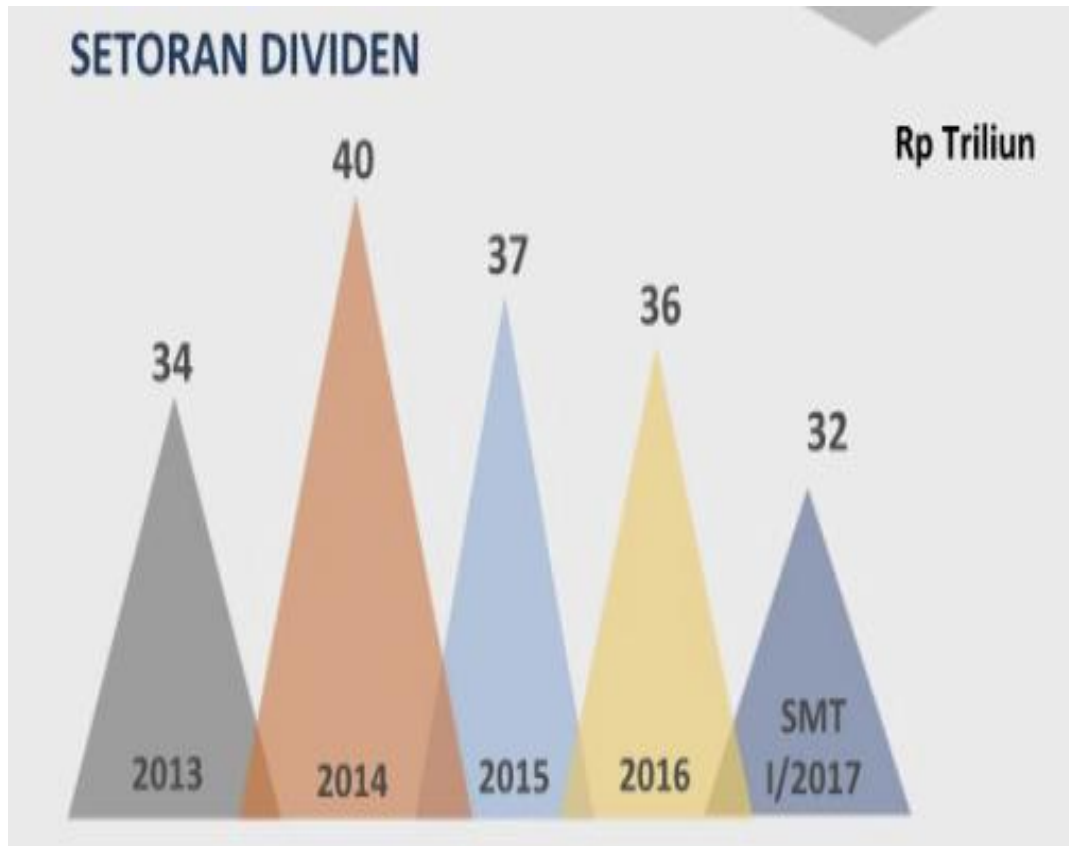


PROFIL KINERJA BUMN



- Pada tahun 2014 dari 119 BUMN hanya 93 BUMN mencatatkan laba bersih, sisanya 26 BUMN merugi.
- Total aset BUMN pada 2016 sebesar Rp6.325 triliun, meningkat 9,33% dari 2015 (Rp5.752 triliun). Nilai ekuitas (modal) pemerintah di BUMN sebesar Rp2.234 triliun atau tumbuh 20% dari 2015. Nilai ekuitas ini menggambarkan nilai kepemilikan riil pemerintah pada BUMN, porsinya 35,32 persen terhadap total aset BUMN

KONTRIBUSI BUMN TERHADAP NEGARA TURUN



Komparasi Laba Bersih dan Kontribusi terhadap PDB 2014:

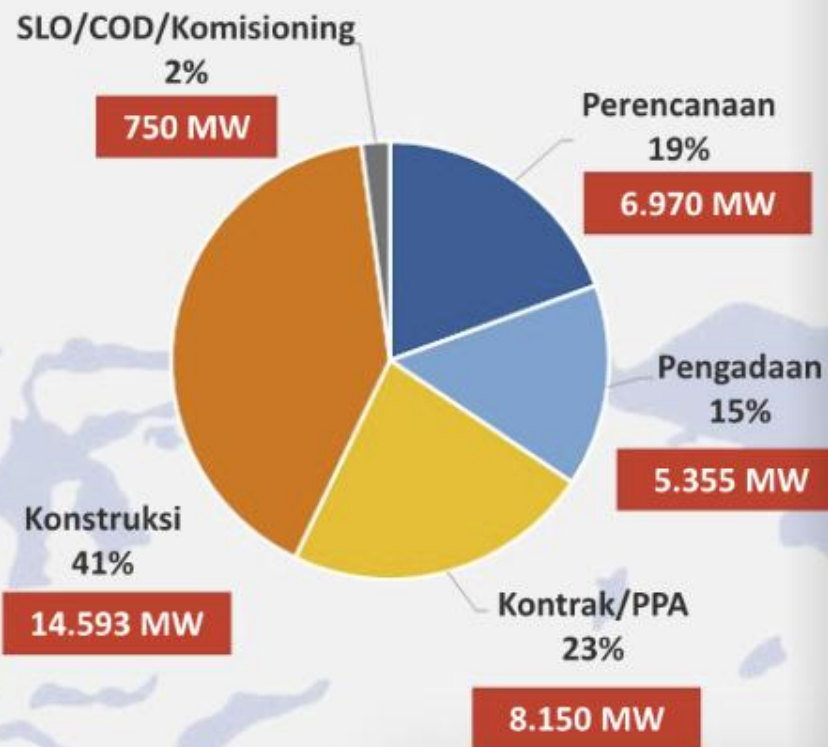
BUMN Indonesia : US\$ 11,8 miliar
(1,3 persen)

Temasek Singapura : US\$ 15,2 miliar
(5 persen)

BUMN China : US\$ 319 miliar
(3,1 persen)

PENUGASAN MEMBERATKAN KEUANGAN BUMN

PROGRES PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK 35.000 MW

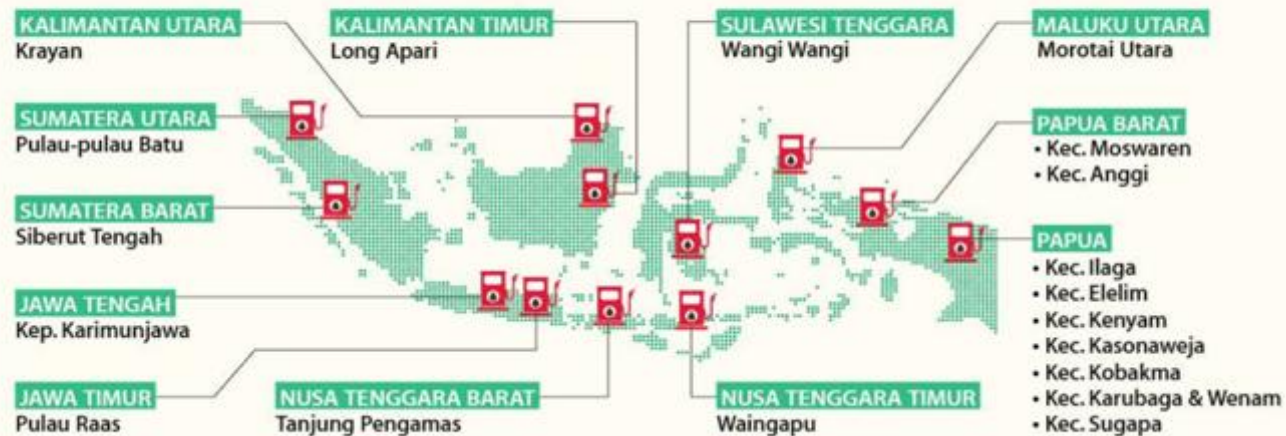


MEWUJUDKAN BBM SATU HARGA

Pemerintah menugaskan Pertamina untuk membangun lembaga penyalur di 148 kabupaten/kota hingga 2019. Hal ini dilakukan untuk menyukseskan program BBM Satu Harga.

SEBARAN LOKASI LEMBAGA PENYALUR

Lembaga penyalur yang sudah beroperasi sampai dengan April 2017.



PENYESUAIAN HARGA*

Harga Premium dan Solar sejumlah wilayah sebelum dan sesudah program BBM Satu Harga.

Sebelum	Sesudah
Kec. Ilaga, Papua Rp 50.000-Rp 100.000	Premium Rp 6.450
Kec. Anggi, Papua Barat Rp 15.000-Rp 30.000	Solar Rp 5.150

*Per liter

#BBMBerkeadilan

STRATEGI PENGELOLAAN BUMN

Efficiency/ Externalities	Low	High
Low	<ul style="list-style-type: none">-Likuidasi-Sell (cut loss)	<ul style="list-style-type: none">-Penambahan modal/IPO
High	<ul style="list-style-type: none">-Restrukturisasi-Korporatisasi-Partnership/Aliansi Strategis	<ul style="list-style-type: none">-Tak ada masalah-Jangan diganggu: jangan digabung dengan yang masih sakit

Externalities/eksternalitas positif bagi masyarakat
Sumber: Dikonstruksikan oleh Faisal Basri

PROSES HOLDING BUMN

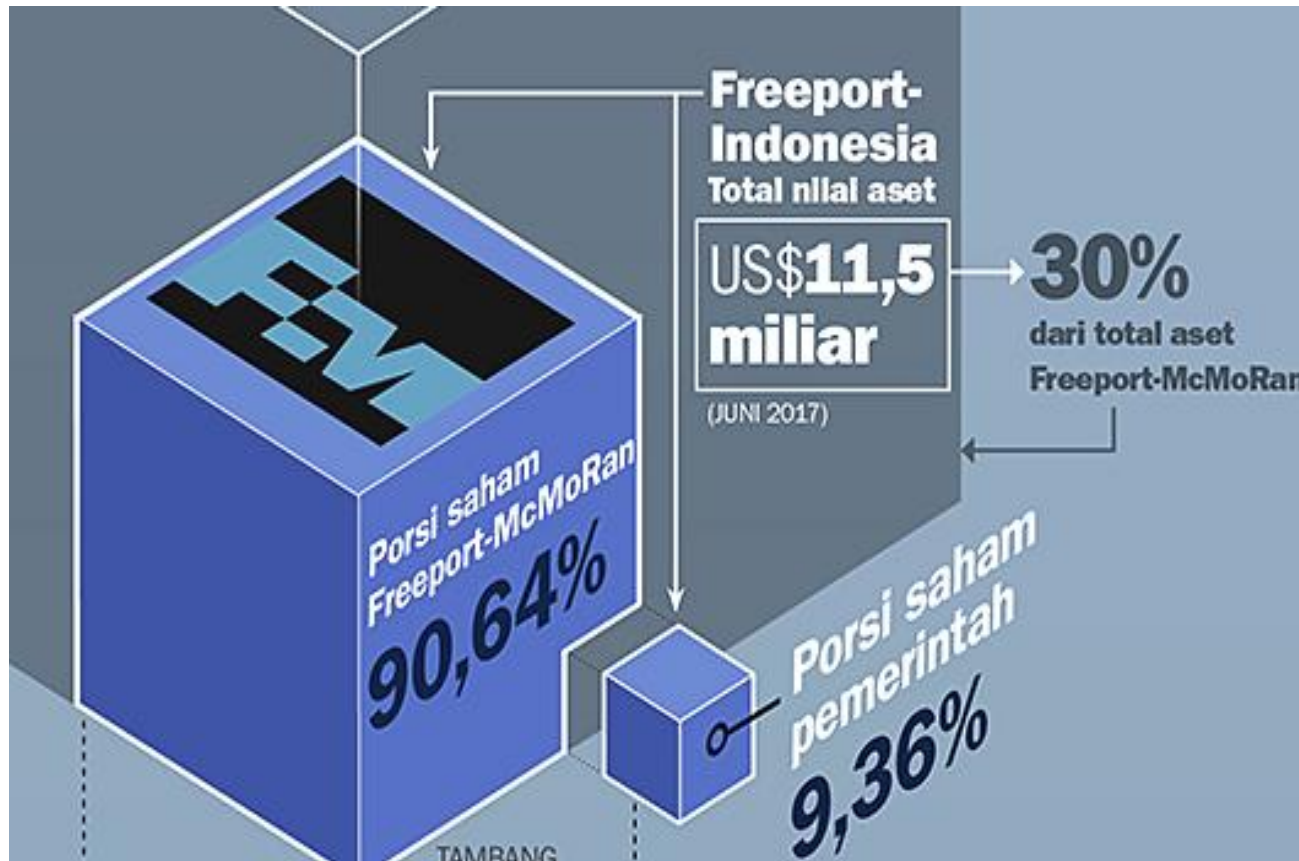
Kepemilikan Saham Pemerintah di BUMN Tambang



Paska Holding



HOLDING TAMBANG UNTUK AKUISISI FREEPORT?



Deal or no Deal?

Nilai Saham versi Pemerintah 51% = Rp54 triliun

Nilai Saham versi Freeport 51% = Rp90 triliun

SURAT YANG BOCOR



Freeport-McMoRan Inc.
333 North Central Avenue
Phoenix, AZ 85004

Richard C. Adkerson
President & Chief Executive
Telephone: 602-366-7663
Facsimile: 602-366-7336
E-mail: richard_adkerson@fml.com

September 28, 2017

Secretary General Hadiyanto
Ministry of Finance
Republic of Indonesia

- *Freeport's international shareholders will not accept any transaction that does not reflect the fair value of the business based on our contractual rights through 2041.*

Freeport has obtained legal opinions from highly regarded Indonesian counsel supporting its rights to 2041. Furthermore, Freeport has invested \$14 billion to date and plans to invest an additional \$7 billion in underground development projects through 2021, which benefit the operations through 2041. The Government has approved its long-term plans through 2041 through the AMDAL and other document submissions.

Freeport Response to Government Position 3:

3. Freeport will conduct divestment through the sale of shares owned by FCX and its Joint Venture partner and will discuss PTFI's capitalization to ensure that the company can conduct capital investment in the future.

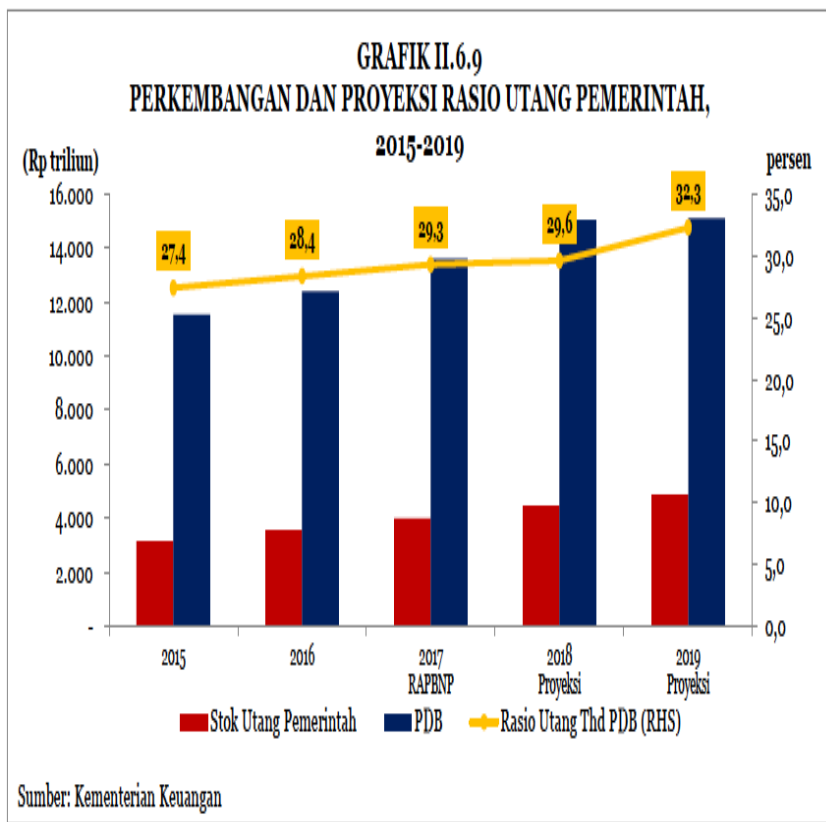
- *The issuance of new shares will require a larger investment by the Indonesian participant to reach 51 percent and will result in overcapitalization of PTFI and an inefficient capital structure.*
- *Freeport will review with the Government plans to fund capital expenditures.*

PP 72 TAHUN 2016: PRIVATISASI TERSELUBUNG?

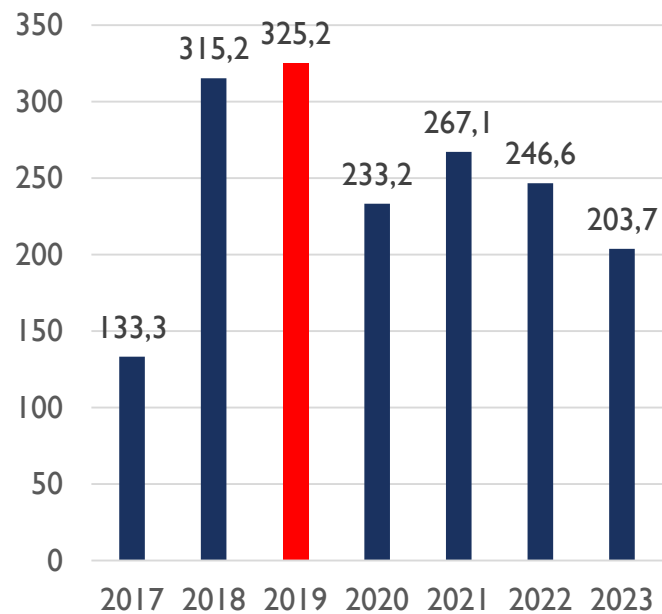
Pasal 2A Ayat 1

- Ketentuan ini memberikan dasar hukum pengalihan saham milik Negara kepada BUMN atau PT (lain) dalam rangka PMN tanpa mekanisme APBN, melewati proses persetujuan DPR, dan mengesampingkan peran auditif BPK.
- Pada dasarnya, terdapat pertentangan pada UU BUMN dan UU Keuangan Negara perihal “kekayaan negara yang dipisahkan”.
- Diperlukan formulasi yang jelas terkait pengelolaan dan pengawasan BUMN sesuai prinsip good governance dengan business judgement rules
- Perubahan mekanisme PMN tanpa melalui APBN harus melalui UU, tidak dapat melalui PP

RESIKO UTANG PEMERINTAH

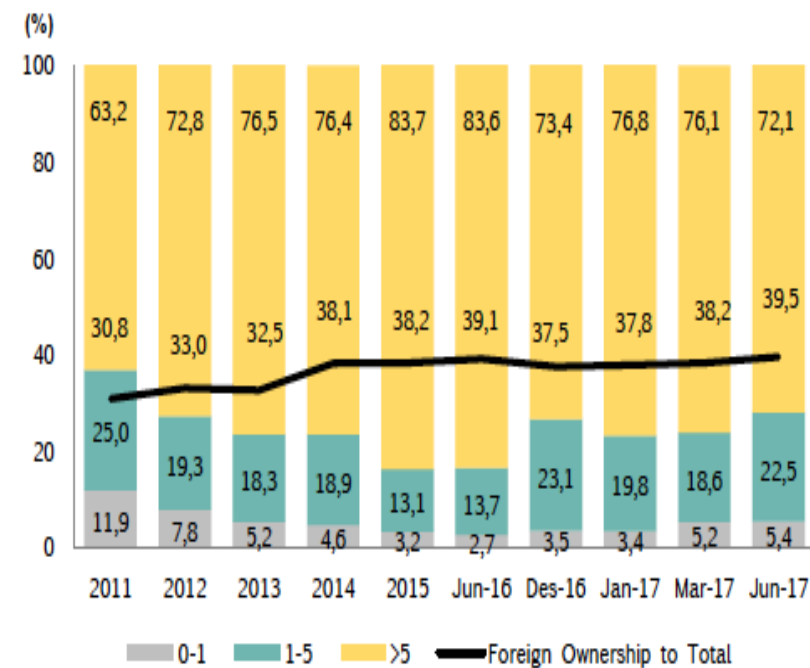


Profil Utang Jatuh Tempo (dalam Rp Triliun)

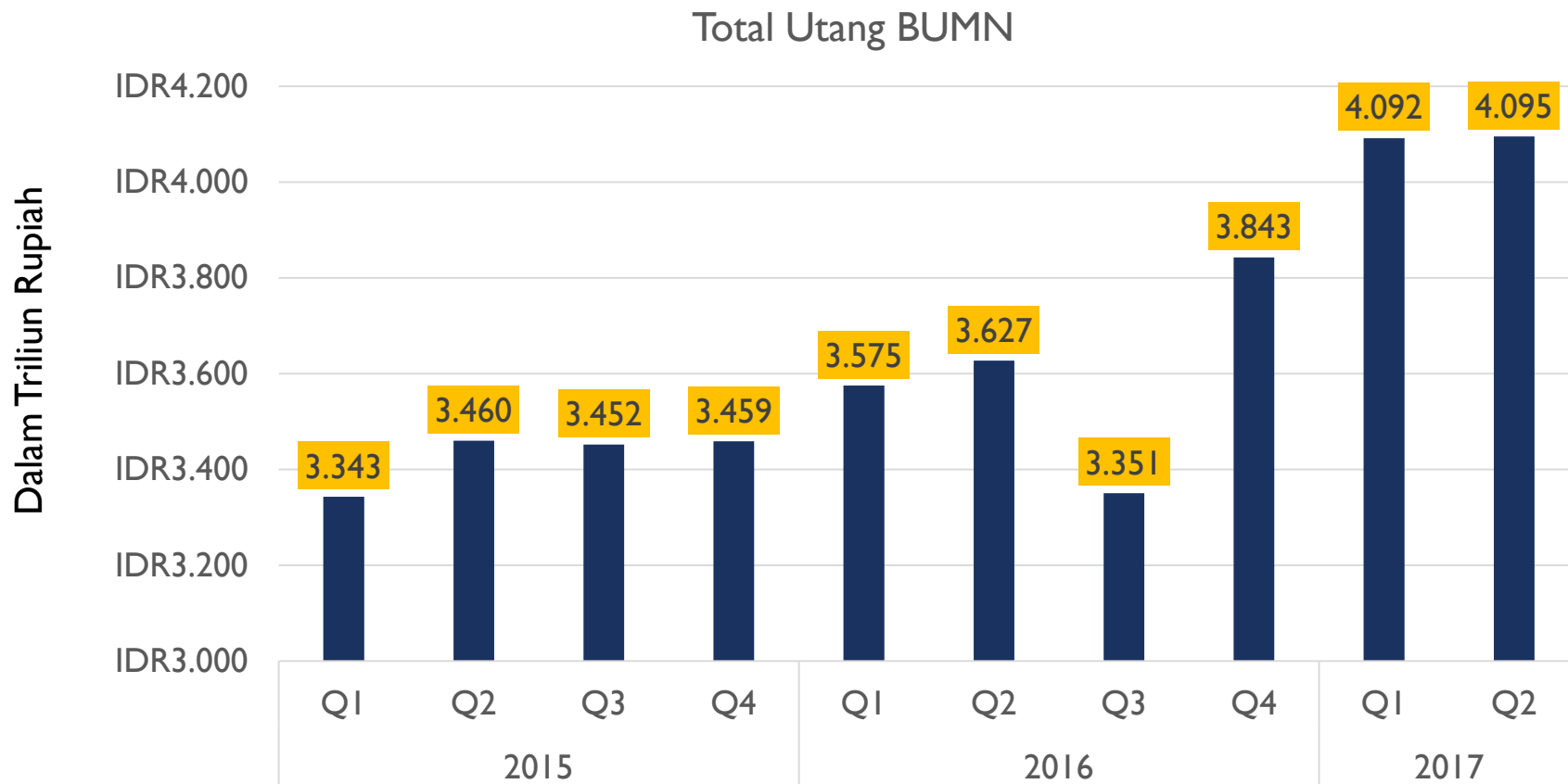


Sumber: Kementerian Keuangan, 2017

Kepemilikan Asing di Surat Utang Pemerintah



UTANG SEKTOR PUBLIK MENINGKAT



PLN Berpotensi Gagal Bayar Utang, Sri Mulyani Ingatkan 2 Menteri

Pebrianto Eko Wicaksono
27 Sep 2017, 11:00 WIB

Share 2.7k



Sumber: Bank Indonesia, 2017

KASUS GAGAL BAYAR UTANG SRILANKA



- Kasus Gagal Bayar Pinjaman Pelabuhan Hambantota sebesar US\$ 8 Miliar membawa konsekuensi besar bagi Srilanka. Salah satunya adalah penyerahan pelabuhan Hambantota dan Bandara Mattala untuk dikelola Pemerintah China plus 15.000 ha areal kawasan ekonomi khusus pindah tangan ke China.